

ANALISIS PERSEPSI PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN AKSESIBILITAS TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA CIPAKU KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

Faza Meila Fauzani¹ Atiek Sri Purwati² Sudjono³

^{1,2,3}Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

E-mail: fazameila34@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the effect of the presentation of responsibility statement and accessibility to the transparance and accountability in the management of the village fund in Cipaku Village, Mrebet Subdistrict, Purbalingga Regency. This research is a quantitative research. The population of the research is local people of the Cipaku Village, Mrebet Subdistrict, Purbalingga Regency a total of 7.770 inhabitants. The sampling technique has been carried out by using purposive sampling method, samples obtained in this study were 100 respondents using slovin formula. The analytical method has been run by using multiple linear regression analysis and the SPSS. The result of this research showed that the presentation of the responsibility statement and accessibility positively and significantly affected the transparance and accountability in the management of the village fund.

Keywords: *presentation of responsibility statement, accesibility, transparance, accountability.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga sejumlah 7.770 jiwa. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden dengan menggunakan rumus *slovin*. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas, transparansi, akuntabilitas

PENDAHULUAN

Isu mengenai transparansi dan akuntabilitas di Indonesia semakin menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal tersebut disebabkan karena adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah sehingga menyebabkan perubahan yang signifikan dalam pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak dan wewenang yang diberikan kepada daerah pada dasarnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan baik kepada masyarakat maupun pemerintah pusat (Miftahul, 2017).

Transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2004). Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala (Mardismo, 2015). Pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan

¹Corresponding Author

E-mail : fazameila34@gmail.com

[Type here]

sumber daya publik (Mardiasmo, 2006). Tujuan dari penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik (Sujana, 2002 dalam Apriliani, 2015). Dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi unsur-unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi karakteristik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah harus disampaikan kepada publik secara terbuka dan jujur, seertiip melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan mudah diakses oleh publik maka akan berdampak terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebaliknya jika penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah (Miftahul, 2017).

Aksesibilitas laporan keuangan adalah sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik (Lewier dan Kurniawan, 2016). Laporan pertanggungjawaban yang mudah di akses bukan hanya berlaku untuk pemerintah daerah, melainkan juga untuk pemerintah desa. Salah satu laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa yaitu laporan pertanggungjawaban Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa yang diberikan kepada desa-desa di Indonesia, menjadikan pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dana desa tersebut. Dalam pengelolaannya setiap kegiatan yang pendanaanya diambil dari Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka. Selain itu, pemerintah desa juga diwajibkan harus mengikuti aturan yang ada yang telah ditetapkan agar Dana Desa tersebut dapat dikelola sesuai dengan peraturan dan tepat sasaran.

Permasalahan dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia masih ditemui, salah satu masalah yang sangat disoroti yaitu banyak desa di Indonesia yang dinilai belum transparan sehingga memunculkan penyimpangan penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh aparat pemerintahan. Menurut hasil kajian Tren Penanganan Kasus Korupsi tahun 2016 yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menyimpulkan bahwa dari hasil kajian tersebut fenomena korupsi di daerah kian meluas setelah pemerintah pusat mengimplementasikan Dana Desa. Ada sekitar 62 kasus korupsi di pemerintahan desa yang melibatkan 61 kepala desa dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 10,4 M (www.tirto.id). Oleh karena itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa perlu diterapkan.

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu daerah otonom yang berada di provinsi Jawa Tengah, dan menjadi Kabupaten termiskin ke-5 setelah Kabupaten Brebes dengan begitu desa-desa di Kabupaten Purbalingga sangat membutuhkan pengalokasian anggaran agar dapat menyelenggarakan pemerintahan serta dapat membangun dan memberdayakan masyarakat desa. Saat ini di Kabupaten Purbalingga tercatat ada 18 kecamatan dan 224 desa penerima dana desa.

¹Corresponding Author

E-mail : fazameila34@gmail.com

Tabel:1
Data Penerimaan Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Dana Desa
1	Kemangkon	15.880.059.000
2	Bukateja	12.186.096.000
3	Kejobong	11.119.591.000
4	Kaligondang	15.087.175.000
5	Purbalingga	1.634.413.000
6	Kalimanah	11.344.935.000
7	Kutasari	12.216.477.000
8	Mrebet	16.196.479.000
9	Bobotsari	13.342.818.000
10	Karangreja	6.654.241.000
11	Karanganyar	10.875.900.000
12	Karangmoncol	9.671.137.000
13	Rembang	10.710.591.000
14	Bojongsari	11.236.188.000
15	Padamara	10.670.727.000
16	Pengadegan	7.812.183.000
17	Karangjambu	5.386.284.000
18	Kertanegara	9.199.616.000
Jumlah		191.244.910.000

Sumber : BAKEUDA Purbalingga data diolah

Setiap kecamatan penerima dana desa jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan atau kondisi daerah tersebut seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis. Penerima Dana Desa tertinggi di Kabupaten Purbalingga yaitu Kecamatan Mrebet dengan anggaran Dana Desa sebesar Rp. 16.196.479.000, hal ini dikarenakan Kecamatan Mrebet merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu 19 desa.

Tabel: 2.
Data Penerimaan Dana Desa di Kecamatan Mrebet Tahun 2017

No	Nama Desa	Jumlah Dana Desa
1	Binangun	875.210.000
2	Bojong	849.997.000
3	Campakoah	834.168.000
4	Cipaku	923.677.000
5	Karangnangka	844.216.000
6	Karanturi	831.260.000
7	Kradenan	823.188.000
8	Lambu	825.937.000
9	Mangkunegara	803.217.000
10	Mrebet	838.743.000
11	Onje	865.429.000
12	Pagerandong	848.284.000
13	Pangalusan	904.758.000
14	Sangkanayu	880.508.000
15	Selaganggeng	850.493.000
16	Serayu KR. Anyar	851.350.000
17	Serayu Larangan	849.721.000
18	Sindang	842.646.000
19	Tangkisan	853.684.000

¹Corresponding Author

E-mail : fazameila34@gmail.com

[Type here]

Jumlah	16.196.479.000
--------	----------------

Sumber : *BAKEUDA Purbalingga data diolah*

Berdasarkan data penerimaan Dana Desa di Kecamatan Mrebet diatas, desa dengan Dana Desa tertinggi yaitu Desa Cipaku. Dengan diberikannya Dana Desa yang tinggi di desa Cipaku tersebut maka menjadikan pemerintah desa untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Namun, dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga berdasarkan pernyataan masyarakat masih terdapat masalah salah satunya yaitu Namun, dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga berdasarkan pernyataan masyarakat masih terdapat masalah salah antara lain yaitu terdapat masyarakat Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang tidak mengetahui bagaimana realisasi Dana Desa (DD) yang dijalankan oleh aparatur desa dan merasa kesulitan jika ingin mengakses informasi terkait dengan pengelolaan dana desa, sehingga masih ditemukan kurang adanya transparansi dan kemudahan akses atau aksesibel dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat desa akan pertanggungjawaban dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Cipaku, sedangkan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan desa yang perlu diterapkan.

Sehingga peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa seperti penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ummul Bararah (2013). Perbedaan penelitian ini adalah dengan menambahkan satu variabel independen yaitu aksesibilitas. Aksesibilitas digunakan karena merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga sektor publik, selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh masyarakat. Artinya bahwa pemerintah harus membuka akses kepada publik untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana publik. Selain itu, objek pada penelitian ini juga berbeda dari sebelumnya yaitu pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Memperhatikan latar belakang diatas, maka judul yang akan diambil adalah “ Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga”.

Identifikasi Masalah

1. Apakah penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga?
2. Apakah aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga?
3. Apakah penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga?
4. Apakah aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk menganalisis pengaruh aksesibilitas terhadap transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.
3. Untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga..
4. Untuk menganalisis pengaruh aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya akuntansi sektor publik, yang nantinya juga akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan informasi. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu bagi

¹Corresponding Author

E-mail : fzameila34@gmail.com

pengelola Dana Desa, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan pengelola agar dapat mengelola Dana Desa dengan sebaik-baiknya. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sebagaimana yang diharapkan sekaligus menjadi referensi yang memadai untuk penelitian lebih lanjut dengan objek dan kajian yang lebih mendalam mengenai Dana Desa

Tinjauan Literatur Dan Pengembangan Hipotesis

Teori Stewardship

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *Agency theory* yaitu *stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah desa (*stewards*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat (*principals*). Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Selain membuat pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, pemerintah desa (*stewards*) juga berkewajiban untuk memberikan informasi terkait pengelolaan Dana Desa secara terbuka, dan jujur, baik itu melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa masyarakat (*principals*) berhak mengetahui informasi tersebut.

Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 1 ayat 2 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Dana Desa

Dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah dana APBN yang diperuntukan untuk desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2004). Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010).

Akuntabilitas

¹Corresponding Author

E-mail : fazameila34@gmail.com

[Type here]

Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat. Menurut Mahmudi (2007) dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik. Dengan pengertian yang lebih luas, akuntabilitas berarti pelayanan kepada publik dan pertanggungjawaban kepada publik. Dalam suatu struktur pemerintahan, akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan.

Penyajian Laporan Pertanggungjawaban

Organisasi dalam pengambilan keputusan dibagi menjadi dua macam yaitu pengambilan keputusan secara terentralisasi dan pengambilan keputusan secara terdesentralisasi (Abdul Halim, 2014). Pusat pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik menjadi dua klasifikasi yaitu pusat pelayanan dan pusat misi (Mahmudi, 2007). Pusat pelayanan menghasilkan output yang digunakan untuk mendukung kerja pusat pertanggungjawaban lainnya (*support center*), sedangkan pusat misi menghasilkan output yang membantu secara langsung dengan pencapaian tujuan organisasi.

Bentuk dari sebuah pertanggungjaawaban adalah laporan keuangan, laporan keuangan ini menciptakan akuntabilitas publik. Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik ini digunakan untuk memberikan informasi tentang keuangan dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan (V. Wiratna Sujarweni: 2015). Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010).

Aksesibilitas

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koester, 2002 dalam Lewier, 2016). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian aksesibilitas adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Sukhemi, 2012). Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (*internet*); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004, dalam Yesi et al., 2014)

Hipotesis

Penyajian Laporan Pertanggungjawaban terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010:18). Penyajian laporan keuangan yang terbuka kepada publik akan menjadi alat ukur kinerja manajemen di pemerintah daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan daerah serta semakin sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka akan meningkatkan transparansi laporan keuangan karena akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi alat ukur kinerja daerah (Apriliani, et al., 2015). Penelitian yang mendukung hal ini yaitu penelitian Ummul Bararah (2013) yang menyatakan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh positif

¹Corresponding Author

E-mail : fzameila34@gmail.com

terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Aksesibilitas terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Untuk menciptakan transparansi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Selain menyajikan laporan keuangan, hal lain yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan akses laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan. Alasannya adalah apabila menyajikan laporan keuangan tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan maksimal. Penelitian yang mendukung hal ini adalah penelitian Apriliani, et al (2015) yang menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat aksesibilitas yang diberikan oleh daerah maka semakin baik pula tingkat transparansi laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Aksesibilitas berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Penyajian Laporan Pertanggungjawaban terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan yang disampaikan oleh kepala daerah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Apabila penyajian laporan keuangan daerah semakin lengkap, dapat diselesaikan tepat waktu, menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan di masa lalu, jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan, dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya, serta semakin dapat dipahami oleh pengguna karena dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas kemampuan pengguna, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah cenderung semakin baik pula, begitu sebaliknya (Lewier dan Kurniawan, 2016: 11). Penelitian yang mendukung hal ini adalah penelitian Ummul Bararah (2013) yang menyatakan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami (Sande, 2013). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (*internet*), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006). Apabila laporan keuangan daerah semakin dipublikasikan secara terbuka melalui media massa, para pengguna semakin mudah memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah, semakin cepat dan mudah masyarakat mengakses laporan keuangan daerah melalui website (*internet*), serta dapat dipahami dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan daerah, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah cenderung semakin baik (Lewier dan Kurniawan, 2016: 11). Penelitian yang mendukung hal ini yaitu penelitian Sukhemi (2012) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan berikut:

¹Corresponding Author

E-mail : fazameila34@gmail.com

[Type here]

H₄ : Aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang berjumlah 7.770. Pada penelitian ini, menentukan jumlah sampel sejumlah 100 responden. Penetapan besarnya sampel menggunakan rumus *slovin*. Pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut, (1) masyarakat Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang sedang berada di tempat atau sedang tidak merantau, (2) masyarakat Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang mengerti mengenai Dana Desa, (3) masyarakat Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang berusia diatas 20 tahun. Data dikumpulkan dalam metode survei, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan dalam kuesioner yang diisi atau dijawab oleh responden.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, tahapan analisis data dimulai dengan uji validitas, uji reliabilitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), dan uji analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis.

Pengujian hipotesis menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial dengan tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, nilai alpha (α)=0,05. Persamaan regresi linier berganda dimaksud untuk menganalisis pengaruh dari : Penyajian Laporan Pertanggungjawaban (X_1), Aksesibilitas (X_2) terhadap transparansi (Y_1) dan akuntabilitas (Y_2) dengan formula:

$$Y_1 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y_2 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai responden yang diteliti dengan melihat nilai mean, maksimum, minimum dan standar deviasi.

Tabel:3.

Variabel	Hasil Analisis Statistik Deskriptif				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penyajian laporan pertanggungjawaban (X_1)	100	2,000	5,000	3,558	0,860
Aksesibilitas (X_2)	100	1,000	5,000	3,308	0,931
Transparansi pengelolaan Dana Desa (Y_1)	100	2,200	5,000	3,974	0,582
Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Y_2)	100	2,600	4,800	4,040	0,515

Sumber: Data primer yang diolah

Uji Validitas dan Realibilitas

Pada uji validitas menggunakan analisis korelasi *product moment* dengan *degree of freedom* (df) = $(n-2)$ dan tingkat signifikansinya 95% ($\alpha=0,05$). Seluruh item pernyataan dikatakan valid dengan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,374). Suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai *croanbach alpha* (α) > 0,60. Variabel X_1 memiliki nilai 0,892, variabel X_2 memiliki nilai 0,851, variabel Y_1 memiliki nilai 0,784 dan variabel Y_2 memiliki nilai 0,624. Jadi keempat variabel penelitian dikatakan reliabel karena memiliki nilai *croanbach alpha* (α) > 0,60.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan Uji *Statistic Non-Parametrik Komlogorov-Smirnov (K-S)*.

¹Corresponding Author

E-mail : fzameila34@gmail.com

Tabel 4:
. Ringkasan Hasil Uji Normalitas Data

No	Variabel	Nilai Kolmogorov Smirnov	Asymp. Sig.	Keterangan
1	Standardized Residual	0,827	0,501	Normal

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4 hasil uji normalitas data, untuk *standardized residual variable* adalah 0,501 lebih besar dari nilai α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen variable*). Cara untuk mendeteksinya yaitu dengan menggunakan *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance value* jika nilai $VIF \geq 10$ dan *tolerance value* $\leq 0,10$ maka terdapat multikolinearitas. Pada variabel X_1 nilai $VIF 1,570 \leq 10$, variabel X_2 nilai $VIF 1,570 \leq 0,10$. berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Gejala heteroskedastisitas diuji dengan metode *Glejser* dengan cara menyusun regresi antara nilai *absolut residual* dengan variabel bebas. Apabila masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap *absolut residual* ($\alpha=0,05$) maka dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Sanusi, 2011). Kriteria yang digunakan menurut Ghazali (2016) adalah apabila nilai p-value $< 0,05$, maka model tersebut terdapat heteroskedastisitas. Namun jika p-value $> 0,05$ maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

Tabel 5:
Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig.	Keterangan
1	Penyajian laporan pertanggungjawaban (X_1)	0,950	Tidak Ada Heteroskedastisitas
2	Aksesibilitas (X_2)	0,116	Tidak Ada Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah

Uji Analisis Regresi Berganda Model Pertama

Tabel 6:
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda Model Pertama

No.	Variabel	Koefisien Regresi	t_{hitung}	t_{tabel} (satu sisi)
1	Penyajian laporan pertanggungjawaban (X_1)	0,195	2,579	> 1,661
2	Aksesibilitas (X_2)	0,153	2,193	> 1,661
Konstanta		= 2,773		
Koef. Determinasi		= 0,212		
F_{hitung}		= 14,342		

Sumber: Data primer yang diolah

Dari hasil uji regresi linear berganda model pertama, didapatkan persamaan regresi yaitu:

¹Corresponding Author

E-mail : fazameila34@gmail.com

[Type here]

$$Y_1 = 2,773 + 0,195X_1 + 0,153X_2$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan beberapa hal, yaitu konstanta sebesar 2,773 yang berarti jika variabel penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas tidak ada perubahan atau sama dengan nol. Koefisien regresi sebesar 0,195 yang berarti variabel penyajian laporan pertanggungjawaban mempunyai pengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan Dana Desa, atau dapat pula dinyatakan bahwa jika penyajian laporan pertanggungjawaban meningkat, maka akan dapat meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Desa. Koefisien regresi sebesar 0,153 yang berarti variabel aksesibilitas mempunyai pengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan Dana Desa, atau dapat pula dinyatakan bahwa jika aksesibilitas meningkat, maka akan dapat meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Desa.

Uji Goodness of Fit

Berdasarkan *output* regresi berganda model pertama diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 14,342 lebih besar dari nilai F_{tabel} dengan $df = (k - 1)$ dan $(n - k)$ sebesar 3,07. Hasil uji F tersebut menunjukkan bahwa model regresi berganda pertama yang terbentuk dinyatakan tepat atau cocok dengan data hasil penelitian (*goodness of fit*).

Koefisien Determinasi

Output analisis regresi berganda model pertama menunjukkan bahwa koefisien determinasi R^2_{adj} sebesar 0,212, artinya sebesar 21,20 persen variasi perubahan variabel transparansi pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh perubahan variabel penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas, sedangkan 78,80 persen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

Pengujian Hipotesis Uji t

Pengujian signifikansi pengaruh variabel penyajian laporan pertanggungjawaban maupun aksesibilitas terhadap transparansi pengelolaan dana desa secara parsial dilakukan dengan uji t. Berdasarkan tingkat kesalahan (α) = 0,05 dan *degree of freedom* ($n - k$), dimana $n = 100$ dan $k = 3$, maka diketahui nilai t_{tabel} untuk pengujian satu sisi (*one tailed*) sebesar 1,661. Pada *output* analisis regresi berganda model pertama diketahui nilai t_{hitung} variabel penyajian laporan pertanggungjawaban (X_1) sebesar 2,579 dan t_{hitung} variabel aksesibilitas (X_2) sebesar 2,193.

Berdasarkan hasil uji t regresi berganda model pertama diperoleh nilai t_{hitung} variabel penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap transparansi pengelolaan dana desa (2,579) lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,661). Hasil uji statistik tersebut menunjukkan bukti bahwa secara parsial penyajian laporan pertanggungjawaban mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan dana desa. Dengan demikian, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan dana desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, **diterima**.

Hasil uji t regresi model regresi pertama juga menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel aksesibilitas terhadap transparansi pengelolaan dana desa (2,193) juga lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,661). Hasil uji tersebut membuktikan bahwa secara parsial aksesibilitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan dana desa. Dengan demikian, maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan dana desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, **diterima**.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda Model Kedua

Tabel 7: Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda Model Kedua

No.	Variabel	Koefisien Regresi	t_{hitung}	t_{tabel} (satu sisi)
1	Penyajian laporan pertanggungjawaban (X_1)	0,144	2,234	> 1,661
2	Aksesibilitas (X_2)	0,195	3,275	> 1,661
Konstanta		=	2,883	
Koef. Determinasi		=	0,269	
F_{hitung}		=	19,254	

Sumber: Data primer yang diolah

Dari hasil uji regresi linear berganda model kedua, didapatkan persamaan regresi yaitu:

$$Y_2 = 2,883 + 0,144X_1 + 0,195X_2$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan beberapa hal, yaitu konstanta sebesar 2,883 yang berarti jika variabel penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas tidak ada perubahan atau sama dengan nol. Koefisien regresi sebesar 0,144 yang berarti variabel penyajian laporan pertanggungjawaban mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, atau dapat pula dinyatakan bahwa jika penyajian laporan pertanggungjawaban meningkat, maka akan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Koefisien regresi sebesar 0,195 yang berarti variabel aksesibilitas mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, atau dapat pula dinyatakan bahwa jika aksesibilitas meningkat, maka akan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Uji Goodness of Fit

Berdasarkan output regresi berganda model kedua diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 19,254 lebih besar dari nilai F_{tabel} dengan $df = (k - 1)$ dan $(n - k)$ sebesar 3,07 (lampiran 12). Hasil uji F tersebut menunjukkan bahwa model regresi berganda kedua yang terbentuk dinyatakan tepat atau cocok dengan data hasil penelitian (*goodness of fit*).

Koefisien Determinasi

Output analisis regresi berganda model kedua menunjukkan bahwa koefisien determinasi R^2_{adj} sebesar 0,269, artinya sebesar 26,90 persen variasi perubahan variabel akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dapat dijelaskan oleh perubahan variabel penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas, sedangkan 73,10 persen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

Pengujian Hipotesis Uji t

Pengujian signifikansi pengaruh variabel penyajian laporan pertanggungjawaban maupun aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa secara parsial dilakukan dengan uji t. Berdasarkan tingkat kesalahan (α) = 0,05 dan *degree of freedom* ($n - k$), dimana $n = 100$ dan $k = 3$, maka diketahui nilai t_{tabel} untuk pengujian satu sisi (*one tailed*) sebesar 1,661. Adapun dari output analisis regresi berganda model kedua pada lampiran 9 diketahui nilai t_{hitung} variabel penyajian laporan pertanggungjawaban (X_1) sebesar 2,234 dan t_{hitung} variabel aksesibilitas (X_2) sebesar 3,275.

Mengacu pada hasil uji t regresi berganda model kedua dapat diketahui nilai t_{hitung} variabel penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (2,234) lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,661). Hasil uji statistik tersebut menunjukkan bukti bahwa secara parsial penyajian laporan pertanggungjawaban mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, **diterima**.

Hasil uji t regresi berganda model kedua dapat diketahui nilai t_{hitung} variabel aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (3,275) lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,661). Hasil uji tersebut

¹Corresponding Author

E-mail : fazameila34@gmail.com

[Type here]

membuktikan bahwa secara parsial aksesibilitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, maka hipotesis keempat yang menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, **diterima**.

Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Dari hubungan kausal tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin baik persepsi masyarakat terhadap penyajian laporan pertanggungjawaban dana desa, maka akan semakin baik pula persepsi masyarakat terhadap transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Teori *stewardship* menyatakan pemerintah desa melaksanakan tugasnya untuk membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan teori *stewardship* berkewajiban untuk memberikan semua informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa secara terbuka atau transparan melalui laporan pertanggungjawaban. Pemerintah desa harus menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan transparansi dengan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriliani et al., (2015) menyatakan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan daerah, serta semakin sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka akan dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan, karena akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi alat ukur kinerja daerah. Penyajian laporan pertanggungjawaban yang terbuka kepada publik akan menjadi alat ukur kinerja manajemen pemerintahan di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Aliyah (2012) dalam penelitiannya bahwa dengan meningkatnya penyajian laporan keuangan daerah akan berimplikasi terhadap meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini secara empiris mendukung temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Ummul Bararah (2013) bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Aksesibilitas terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian ini menemukan bukti bahwa aksesibilitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Dari hubungan kausal tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin baik persepsi masyarakat terhadap aksesibilitas dana desa, maka akan semakin baik pula persepsi masyarakat terhadap transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan teori *stewardship* pemerintah desa selaku *steward* berkewajiban untuk memberikan kemudahan akses terhadap informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa secara terbuka atau transparan. Hasil penelitian Apriliani et al., (2015) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat aksesibilitas yang diberikan oleh daerah maka semakin baik pula tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ema (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa apabila pemerintah desa menyajikan laporan pertanggungjawaban tetapi tidak memberikan akses kepada para pengguna laporan pertanggungjawaban dan masyarakat, maka usaha untuk menciptakan transparansi pada pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan maksimal. Semakin baik tingkat aksesibilitas yang diberikan pemerintah Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga maka semakin baik pula tingkat transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian ini secara empiris mendukung temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Aliyah (2012) bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Dari hubungan kausal tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin baik persepsi

¹Corresponding Author

E-mail : fazameila34@gmail.com

masyarakat terhadap penyajian laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa, maka akan semakin baik pula persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*steward*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala sesuatu kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Penyajian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jika penyajian laporan pertanggungjawaban disajikan secara lengkap, tepat waktu, menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan di masa lalu, dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya, serta semakin dapat dipahami oleh pengguna maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah cenderung semakin baik dan begitu sebaliknya (Lewier dan Kurniawan, 2016). Apabila penyajian laporan pertanggungjawaban semakin baik maka akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet kabupaten Purbalingga semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Ummul Bararah (2013) bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa aksesibilitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Dari hubungan kausal tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin baik persepsi masyarakat terhadap aksesibilitas pengelolaan Dana Desa, maka akan semakin baik pula persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Teori *stewardship* menjelaskan bahwa memberikan kemudahan akses kepada masyarakat (*principals*) untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan dana desa merupakan kewajiban pemerintah desa selaku *steward*, dalam pengelolaan dana desa masyarakat selaku *principals* berhak mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Akuntabilitas yang efektif tergantung dari akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban atau laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Apabila laporan keuangan daerah semakin dipublikasikan secara terbuka dan para pengguna informasi laporan keuangan semakin mudah dan cepat untuk memperoleh informasi atau mengakses semua informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan serta dapat dipahami dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan daerah, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah cenderung semakin baik. Miftahul (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Artinya semakin baik aksesibilitas laporan keuangan daerah maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas dikatakan baik apabila pemerintah mampu memfasilitasi dan memberikan kemudahan kepada publik dalam memperoleh informasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Sukhemi (2012) yang menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Beberapa hal yang bisa disimpulkan dari penelitian ini, yaitu (1) penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan dana desa, (2) aksesibilitas berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan dana desa, (3) penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (4) Aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

¹Corresponding Author

E-mail : fzameila34@gmail.com

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, S. dan Nahar, A. (2012). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara*. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Vol. 8. No. 2.
- Anies Iqbal Mustofa. (2012). *Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang*. Universitas Negeri Semarang. Vol. 1. No. 1.
- Auditya, L et al,. (2013). *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. *Jurnal Fairness* Vol. 3. No. 1.
- Apriliani, Ni Kadek Alit, Edi Sujana, dan Gede Adi (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, dan Aksesibilitas terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung*. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Vol. 3. No. 1.
- Aziz, Abdul. (2017, Januari 11). Mengurai Benang Kusut Pengelolaan dana Desa. *Tirto.id* . Diakses dari <http://kamp.tirto.id/mengurai-benang-kusut-pengelolaan-dana-desa-cunY?espv=1>
- Badan Keuangan Daerah. (2017). *Data Penerimaan Dana Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2017*.
- Bararah, Ummul. (2013). *Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pengguna Eksternal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nanggro Aceh Darussalam)*. *Skripsi*. Universitas Syiah Kuala.
- Deti Kumalasari. (2016). *Transaparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. Vol. 5. No. 11.
- Ema, Tietien. (2017). *Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana di Desa Wironanggan Kecamatan Gratak Kabupaten Sidoarjo*. *Skripsi*. Institut Agama Islam Surakarta.
- Ghozali. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan menggunakan program IBM SPSS 19*. Badan Penerbitan: Universitas Diponegoro Semarang.
- Halim, Abdul, dan Damayanti, Theresia. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul, dan Kusufi, Muhammad Syam. (2014). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari pemerintah Hingga tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hehanussa, S.J. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah Kota Ambon*. *Jurnal UNISSULA*. Vol. 2. No. 1.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Saku Dana Desa*: Penulis. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>
- Lewier, C.N. dan Kurniawan, C.H. (2016). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten*. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Lily. (2015). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Vol. 2. No. 2
- Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Dewantara Jombang*. Vol. 3. No. 1
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*: UPP STIM YKPN.
- _____. (2010). *Manajemen keuangan*. Jakarta: Airlangga.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miftahul Reza Fauziyah, dan Nur Handayani. (2017). *Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. Vol. 6. No. 6

¹Corresponding Author

E-mail : fazameila34@gmail.com

- Nasrul Kahfi Lubis. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan*. Universitas Samudera, Langsa Aceh. Vol. 1. No. 1
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi. (2011). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta Bandung
- Sujarweni,V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press Yogyakarta.
- Sukhemi. (2012). *Pengaruh Aksesibilitas dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Universitas PGRI Yogyakarta. Vol.1 No. 2
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. CV. Andi Offset.
- Tirto.id. (2017). <http://kamp.tirto.id/mengurai-benang-kusut-pengelolaan-dana-desa-cunY?espv=1>, diakses 11 Januari 2017.
- Umami Risyah, Nurodin, dan Idang (2017). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Vol. 6. No. 11
- Waluyo. (2009). *Akuntansi pajak*. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat
- Werimon, Ghazali, dan Imam . (2007). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Indonesia X.
- Yesi, Ramadhani, Taufeni Taufik, dan Lila Anggraeni (2014). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Vol. 1. No. 2.

¹Corresponding Author

E-mail : fazameila34@gmail.com